



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
IM 3 TAHUN 2023 TENTANG MONITORING PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2023 (1444 HIJRIAH)**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah), perlu dilakukan penambahan tugas serta perubahan jadwal dan lokasi Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah) yang dilaksanakan mulai tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana jadwal dan lokasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KEDUA : Mengubah jadwal dan lokasi monitoring penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah) dalam Lampiran Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2023 tentang Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 (1444 Hijriah) menjadi sebagaimana jadwal dan lokasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA

No.	JABATAN	April 2023																	Mei 2023	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
1	SEKRETARIS JENDERAL	PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK																		
2	INSPEKTUR JENDERAL	BATAM																		
3	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT	CIPALI																		

4	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	PELABUHAN TANJUNG PERAK
5	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
6	DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN	STASIUN GAMBIR - STASIUN MANGGARAI
7	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	STASIUN PASAR SENEN
8	KEPALA BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	LOKASI DAN WAKTU MONITORING MENYESUAIKAN KONDISI DAN KEBUTUHAN DI LAPANGAN
9	KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	LOKASI DAN WAKTU MONITORING MENYESUAIKAN KONDISI DAN KEBUTUHAN DI LAPANGAN
10	STAF AHLI BIDANG LOGISTIK, MULTIMODA, DAN KESELAMATAN PERHUBUNGAN	PELABUHAN PENYEBERANGAN BAKAUHENI
11	STAF AHLI BIDANG KAWASAN DAN LINGKUNGAN	SULAWESI SELATAN/PULAU SELAYAR DAN JAWA TENGAH

12	STAF KHUSUS MENHUB BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	SORONG
13	STAF KHUSUS MENHUB BID. HUBUNGAN INTERNASIONAL	STASIUN GAMBIR - STASIUN MANGGARAI
14	STAF KHUSUS MENHUB BID. EKONOMI DAN INVESTASI TRANSPORTASI	STASIUN YOGYAKARTA
15	STAF UTAMA MENHUB BID. TRANSPORTASI LAUT DAN LOGISTIK MARITIM	PELABUHAN TANJUNG EMAS
16	STAF UTAMA MENHUB BID. TRANSPORTASI DARAT DAN KONEKTIVITAS	PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK

B. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO	JABATAN	APRIL 2023																		MEI 2023	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	
1	KEPALA PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	RIAU																			
2	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA					SUMATERA BARAT															
3	DIREKTUR KELAIKAN UDARA DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA								SUMATERA UTARA (BANDARA KUALANAMU)												
4	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN											JAWA BARAT									
5	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN														BANTEN						
6	KEPALA BIRO UMUM																	DKI JAKARTA			

7	KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERHUBUNGAN	JAWA TENGAH					
8	KEPALA BIRO SDM DAN ORGANISASI		D.I YOGYAKARTA				
9	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK			KALIMANTAN UTARA			
10	DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN				BALI		
11	INSPEKTUR IV					JAWA TIMUR	
12	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA						JAWA TIMUR (BANDARA JUANDA)

13	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	SULAWESI SELATAN					
14	INSPEKTUR INVESTIGASI		MALUKU				
15	KEPALA BIRO HUKUM			D.I YOGYAKARTA			
16	DIREKTUR SARANA PERKERETAAPIAN				JAWA TENGAH (STASIUN SEMARANG)		
17	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI					RIAU	
18	INSPEKTUR II						KEPRI

19	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT	DKI JAKARTA					
20	KEPALA PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN		BANTEN				
21	SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI			JAWA TIMUR			
22	DIREKTUR ANGKUTAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK					JAWA BARAT	
23	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API						D.I YOGYAKARTA
24	SEKRETARIS KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI	BALI					

25	DIREKTUR KEPELABUHANAN		KALIMANTAN UTARA				
26	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI			KALIMANTAN SELATAN			
27	KEPALA PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI, BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI				SULAWESI SELATAN		
28	DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN					MALUKU	
29	DIREKTUR NAVIGASI PENERBANGAN						SULAWESI SELATAN (BANDARA HASANUDDIN)
30	INSPEKTUR I	SUMATERA BARAT					

31	DIREKTUR KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI		KEPRI				
32	DIREKTUR ANGKUTAN UDARA			BALI (BANDARA I GUSTI NGURAH RAI)			
33	KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BMN				JAWA TIMUR		
34	DIREKTUR LALU LINTAS, BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK					DKI JAKARTA	
35	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT						JAWA BARAT
36	KETUA MAHKAMAH PELAYARAN	JAWA TIMUR					

37	KEPALA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI		JAWA BARAT				
38	DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT			JAWA TIMUR (PELABUHAN TANJUNG PERAK)			
39	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN				JAWA BARAT (BANDUNG)		
40	DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN					SUMATERA BARAT	
41	KEPALA BIRO PERENCANAAN						KALIMANTAN UTARA
42	DIREKTUR BANDAR UDARA	JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA (BANDARA AHMAD YANI DAN YIA)					

43	Plt. KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK		JAWA TENGAH				
44	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT			SUMATERA BARAT			
45	DIREKTUR PRASARANA, BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK				DKI JAKARTA		
46	KEPALA BIRO KEUANGAN					BALI	
47	DIREKTUR KENAVIGASIAN						PAPUA BARAT DAYA (SORONG)
48	INSPEKTUR III	D.I YOGYAKARTA					

II. FORMAT LAPORAN MONITORING

Laporan Monitoring Monitoring Penyelenggaraan Angkutan Lebaran
Tahun 2023 (1444 Hijriah)
Provinsi ...

1. Dasar Hukum
 2. Personil yang ditugaskan
 3. Waktu Pelaksanaan
 4. Wilayah Monitoring
 5. Hasil Monitoring
 - a. Data per simpul transportasi yang dimonitor
 - b. Kejadian menonjol per simpul transportasi yang dimonitor
 6. Penutup
 7. Lampiran (Rincian Data dan Dokumentasi)
-

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO